

RENCANA KERJA PERUBAHAN

(RENJA)

KECAMATAN SUKATANI

TAHUN 2022



KABUPATEN PURWAKARTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Rencana Kerja Perubahan (Kecamatan Sukatani Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Rencana kerja Perubahan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 memberikan gambaran tentang apa yang akan dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna mempelajari Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Program yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai penjabaran dari perubahan RPJMD untuk jangka waktu lima tahun yang memuat kebijakan ,program dan kegiatan bpembangunan.

Kami menyadari dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini masih terdapat kurang-kekurangannya ,kiranya tidak berlebihan jika masukan,saran dan pendapat sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan dimasa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengembangan dan perencanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang.



Purwakarta, Mei 2022

Camat Sukatani

Hasanudin,S.Pd.Kp

Nip.19660304 199103 1009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD	9
BAB PENUTUP	11
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law* profesionalisme, efektifitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian ditingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Dalam rangka membantu mensukseskan kebijakan dan rencana kerja pimpinan, kami menganggap perlu menyusun suatu rencana kerja yang menggunakan konsep dengan didasari pemikiran analisis manajemen dengan harapan bahwa dengan mengetahui informasi peta kekuatan dan keadaan lingkungan sebagai konsumen yang harus mendapat perhatian serta sumber penyedia kebutuhan organisasi melalui suatu proses analisis sederhana, yang akan mempermudah bagi pelaksana dalam menjabarkannya dan menciptakan kegiatan yang strategis dengan sumber daya yang ada menjadi sumber daya unggulan dan mempunyai kemampuan serta cara atau metode proses penyelesaian dengan cara benar dan sesuai dengan prosedur.

Sebagai langkah awal adalah kami berusaha mendalami apa yang menjadi visi, misi, kebijakan dan tujuan dan rencana kerja jangka menengah yang ada dilingkup Kantor Kecamatan Sukatani yang termuat dalam rencana strategis Kecamatan Sukatani. Kemudian kami sandingkan dengan tugas pokok dan fungsi yang

ada di tiap subbagian dan di tiap seksi sehingga kami mendapat kesimpulan sederhana bahwa pada dasarnya tiap subbagian dan tiap seksi adalah membantu pimpinan dalam cara mengurus sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sukatani yang merupakan tanggungjawab dan amanat dari penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

Langkah selanjutnya kami melakukan analisis sederhana dengan menggunakan analisis SWOT, adalah salah satu analisis manajemen yang merupakan suatu kegiatan penelusuran keadaan dan kemampuan yang ada di tiap subbagian dan di tiap seksi dan sumber daya yang ada, yang kemudian kami pilah kedalam beberapa faktor dan kami beri nilai sendiri untuk dapat menentukan faktor kunci sukses dan langkah-langkah strategi dalam rangka melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan dan atau meraih peluang yang didapat sehingga dapat melaksanakan, guna memberikan manfaat yang lebih besar. Sebagai bahan kajian lebih lanjut hasil analisis diatas, disusun sampai dengan menghasilkan formulasi strategi dan rencana usulan kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pegawai yang ada di tiap subbagian dan seksi, sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan kami membangun suatu tim dengan kata kunci kebersamaan, sehingga masing-masing anggota melengkapi dan menutupi keetidaksempurnaan dalam pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian kegiatan maupun cara pelaksanaannya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran, semangat

membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam mengimplementasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan RENJA Kecamatan Sukatani adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01/2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta (RPJMD) 2018-2023.

16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta (RKPD) Tahun 2016.

17. Keputusan Camat Sukatani Nomor : 100/Renstra/PWK/2018 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani Tahun 2022 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Sukatani tahun anggaran 2022.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkahlangkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sukatani tahun 2022 sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Samapai Denga Triwulan
II Tahun 2022

BAB III. Rencana Kerja dan Pedanaan Perangkat Daerah

3.1. Rencana Kerja dan Pedanaan Perangkat Daerah

BAB IV. Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SKPD SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2022, selain itu juga memperhatikan dokumen Restra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Sukatani mulai tahun 2018 didasarkan pada Renstra 2018-2023 dimana indikator program dan target renstra SKPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukatani.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah tahun 2022 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sukatani sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun yang berakhir samapai dengan Juni 2022

Kode Rekening	Uairan	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%	Ket
5	BELANJA DAERAH	4.171.535.575	1.644.711.640	39,4	
5.1	BELANJA OPERASI	4.141.567.225	1.644.711.640	39,4	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.489.474.026	1.346.872.261	38,6	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	652.093.199	297.839.379	45,7	
5.2	BELANJA MODAL	29.968.350	0		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.968.350	0		
	SURPLUS/DEFISIT	(4.171.535.575)	(1.644.711.640)	39.4	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PEDANAAN OPD

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana kerja OPD Kecamatan Sukatani tersusun dalam program yang merupakan kimpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan kegiatan dalam perencanaan Renja Perubahan Kecamatan Sukatani adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan Meningkatkan Nilai Akutanbilitas Kinerja Kecamatan :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat menuju
Mewujudkan Purwakarta Istimewa
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun rencana Kerja dan Pendanaan OPD Kecamatan Sukatani disajikan pada Lampiran Tabel. 3.1

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Sukatani Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dilingkup Kecamatan Sukatani, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Dalam rangka mencapai target sebagai kabupaten berkarakter di Indonesia, isi dokumen Renja Perubahan Kecamatan Sukatani tahun 2022 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kecamatan Sukatani, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya.

seluruh target pembangunan tahun 2022 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja Perubahan merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang diemban oleh Kecamatan Sukatani sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi

Renja Perubahan Kecamatan Sukatani. Semoga Renja Kecamatan Sukatani Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

LAMPIRAN

Tabel.3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
Kecamatan sukutani

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Selisih	Keterangan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah ;Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Kantor	B;80 Opini;Persen	B;80 Opini;Persen	4.048.141.505	4.048.141.505		
1	7.01.01.2.01	Perencanaan,Penggunaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	12.072.000	12.072.000		
			Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	100 persen	100 persen				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3.200.000	3.200.000		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	4.677.000	4.677.000		
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2.595.000	2.595.000		
2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	14 bulan,1 Dokumen	14 bulan,1 Dokumen	3.495.990.026	3.495.990.026		
			Meningkatnya Kinerja ASN di Kecamatan Sukatani	100 persen	100 persen				
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	3.489.474.026	3.489.474.026		
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.516.000	6.516.000		
3	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	5 Kegiatan	5 Kegiatan	138.206.206	138.206.206		
			Meningkatnya Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Alat Listrik yang disediakan	17 item	17 item	15.433.670	15.433.670		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	22 item	22 item	18.091.346	18.091.346		

	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	41 item	41 item	36.699.190	36.699.190		
			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	660 Dus	660 Dus	39.600.000	39.600.000		
	7.01.01,2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan	4 iten dan 3026 lembar	4 iten dan 3026 lembar	13.742.000	13.742.000		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	140 OH	140 OH	14.640.000	14.640.000		
4	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 item	5 item	30.006.690	30.006.690		
			Meningkatnya Junlah Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen				
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 item	5 item	30.006.690	30.006.690		
5	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Listrik dan Internet, Jumlah Non ASN yang disediakan	12 bulan, 9 orang	12 bulan, 9 orang	259.889.460	259.889.460		
			Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Jasa Penunjang Pemerintahan	100 persen	100 persen				
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	420 lembar	420 lembar	4.200.000	4.200.000		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik dan Internet yang disediakan	12 bulan	12 bulan	31.577.150	31.577.150		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN yang disediakan	9 Orang	9 orang	224.112.310	224.112.310		
6	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Junlah BMD yang dipelihara	25 unit	25 unit	111.977.123	111.977.123		
			Meningkatnya Kualitas Aset Barang Milik Daerah	100 persen	100 persen				
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran pajak kendaraan	10 unit	10 unit	7.200.000	7.200.000		
			Jumlah unit pemeliharaan kendaraan Dinas	4 unit	4 unit	16.000.000	16.000.000		
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9 item	9 item	15.214.750	15.214.750		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	1 unit	1 unit	30.600.000	30.600.000		
			Jumlah Halaman Gedung Kantor	1 unit	1 unit	17.960.000	17.960.000		
			Jumlah Penataan Parkir Gedung Kantor	1 unit	1 unit	25.000.000	25.000.000		
II	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Baik Kategori	Baik Kategori	39.300.000	39.300.000		

	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	39.300.290	39.300.290		
			Tercapainya Program Bantuan Kepada Masyarakat	100 persen	100 persen				
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Kinerja Kecamatan	7 Kegiatan	7 kegiatan	39.300.290	39.300.290		
III	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	80 persen	80 persen	10.000.000	10.000.000		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000	10.000.000		
			Terlaksananya Sosialisasi hasil pembangunan di kelurahan/Desa	100 persen	100 persen				
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Terlaksananya Sosialisasi hasil Pembangunan di Desa	100 persen	100 persen	10.000.000	10.000.000		

